

KAUM PEREMPUAN DALAM DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA 1945-1960AN

WOMEN IN INDONESIAN CULTURAL DIPLOMACY, 1945-1960s

Ayu Wulandari

Universitas Gadjah Mada
Jl. Nusantara 1, Bulaksumur Yogyakarta 55281
E-mail: wulandrayu.99@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v6i2.204

*Naskah Diterima: 30 Agustus 2020 Naskah Direvisi: 10 Oktober 2020
Naskah Disetujui: 25 Oktober 2020*

Abstrak

Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu agenda diplomasi yang kini digalakkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, diplomasi kebudayaan telah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka. Dalam upaya diplomasi kebudayaan tersebut, kaum perempuan menjadi aktor penting yang tidak bisa diabaikan. Sayangnya, keberadaan perempuan dalam penulisan sejarah diplomasi kebudayaan secara khusus dan sejarah diplomasi secara umum masih mengalami pengeksklusian. Kajian ini membahas keterlibatan dan peran perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia sejak 1945 sampai 1960an. Kajian ini bertujuan untuk menghadirkan peran perempuan dalam penulisan sejarah diplomasi kebudayaan, sehingga penulisan sejarah diplomasi kebudayaan menjadi lebih *androgynous*. Kajian ini dilakukan dengan metode sejarah, yang hasilnya menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1945-1960an, banyak perempuan Indonesia yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sepanjang periode tersebut kaum perempuan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan Indonesia. Apalagi, diplomasi kebudayaan pada saat yang sama merupakan salah satu pendukung keberhasilan diplomasi politik yang menjadi fokus kebijakan Soekarno.

Kata Kunci: diplomasi kebudayaan, pengeksklusian, perempuan, Soekarno.

Abstract

Cultural diplomacy is one of the diplomacy agendas currently being promoted by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. If examined further, cultural diplomacy has been carried out since the beginning of Indonesia's independence. In this cultural diplomacy effort, women are important actors

that cannot be ignored. Unfortunately, the existence of women in the history of cultural diplomacy in particular and the history of diplomacy in general is still excluded. Therefore, this study discusses the involvement and role of women in Indonesian cultural diplomacy from 1945 to the 1960s. This study aims to present the role of women in the history of cultural diplomacy, so that the writing of the history of cultural diplomacy becomes more androgynous. This study was conducted using the historical method, the results of which show that during the period 1945-1960s, many Indonesian women were involved in cultural diplomacy. The results of this study indicate that throughout this period women became the spearhead in the implementation of Indonesian cultural diplomacy. Moreover, cultural diplomacy was at the same time one of the supporters of the success of political diplomacy which was the focus of Soekarno's policies.

Keywords: cultural diplomacy, exclusion, women, Soekarno.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kaum perempuan Indonesia mulai menunjukkan kiprahnya dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional. Kini, beberapa posisi duta besar Indonesia di negara lain dipegang oleh kaum perempuan. Bahkan, Menteri Luar Negeri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini pun merupakan seorang perempuan, yakni Retno Marsudi. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan upaya diplomasi Indonesia, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Perempuan Indonesia telah cukup lama berperan dalam kegiatan diplomasi, bahkan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu bidang diplomasi yang didalamnya menonjolkan peran perempuan adalah diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan merupakan upaya diplomasi yang dilakukan suatu negara melalui media seperti tarian, musik, film, kuliner ataupun hal-hal lain yang merupakan hasil kebudayaan. Namun, meskipun perempuan Indonesia telah berperan dalam diplomasi kebudayaan sejak era Soekarno, peran para perempuan tersebut belum terdokumentasikan dengan baik dalam historiografi Indonesia secara umum maupun dalam penulisan sejarah diplomasi Indonesia secara khusus. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sejauh ini

kaum perempuan masih mengalami pengeksklusian dalam sejarah diplomasi kebudayaan Indonesia.

Ketiadaan dan atau pengeksklusian perempuan dalam penulisan sejarah diplomasi kebudayaan tidak lain disebabkan adanya “glorifikasi” (pemujaan) terhadap peran laki-laki dalam sejarah diplomasi. Bagaimanapun, harus diakui bahwa penulisan sejarah diplomasi Indonesia masih sangat *andocentric*, dimana peran laki-laki sangat mendominasi. Selain itu, pengeksklusian perempuan juga merupakan akibat dari penulisan sejarah diplomasi yang terlalu fokus pada diplomasi politik. Dalam *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa* yang ditulis oleh Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Departemen Luar Negeri (1996), peran perempuan bahkan hampir tidak mendapat tempat dalam kajian tersebut. Kemudian, kajian tersebut juga didominasi oleh diplomasi politik yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia, seperti diplomasi memperjuangkan pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, dan perjuangan politik lainnya. Padahal, diplomasi kebudayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya di kancah internasional.

Dalam kajian lain yang menempatkan aspek diplomasi sebagai pembahasan utamanya, peran perempuan dalam diplomasi sejarah kebudayaan belum mendapat tempat. Leifer (1989) dalam kajiannya yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia*, secara detail membahas pasang surut politik luar negeri dan upaya diplomasi Indonesia sejak era Soekarno sampai era Soeharto. Akan tetapi, Leifer hanya menjelaskan kajiannya seputar diplomasi yang mencakup urusan-urusan politik, serta membahas perubahan arah diplomasi Indonesia dari masa ke masa. Misalnya, Leifer menjelaskan bahwa pada masa Indonesia menganut demokrasi liberal atau parlementer, kendali diplomasi dan politik luar negeri dipegang oleh kabinet. Adapun diplomasi yang dilakukan lebih bersifat diplomasi normal. Sementara itu, memasuki periode Demokrasi Terpimpin, upaya diplomasi yang dilakukan lebih bersifat ofensif dan konfrontatif (Leifer, 1989:245). Namun, diplomasi

kebudayaan yang menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Soekarno sampai Soeharto justru lepas dari perhatian Leifer. Absennya diplomasi kebudayaan dari kajian tentang politik luar negeri dan diplomasi Indonesia juga tampak dalam kajian Agung (1990) yang berjudul *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Dengan demikian, penulisan mengenai sejarah diplomasi kebudayaan memang belum sepenuhnya mendapatkan tempat dalam historiografi Indonesia.

Mengenai diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa Soekarno sebenarnya telah dikaji oleh Lindsay (dalam: Lindsay dan Liem, 2012) dalam artikelnya yang berjudul *Performing Indonesia Abroad*. Lindsay dalam kajian tersebut mengulas mengenai beberapa misi kebudayaan yang dilaksanakan pada era Soekarno, manajemen delegasi untuk misi tersebut, dan sebagainya. Kemudian, Cohen (2019) dalam *Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy*, juga telah membahas diplomasi kebudayaan Indonesia terutama dalam aspek kesenian (musik dan tari). Namun sayangnya, baik Lindsay maupun Cohen tidak memprioritaskan perempuan sebagai aktor yang penting dalam diplomasi kebudayaan tersebut.

Dalam historiografi Indonesia, peran perempuan lebih ditampilkan dalam penulisan sejarah pergerakan perempuan, terutama sejak masa pergerakan nasional sampai masa revolusi kemerdekaan. Sebagaimana dikaji oleh Vreede-de Stuers (2008) dalam *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*, kaum perempuan memiliki peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di sisi lain, kemunculan perempuan dalam organisasi pergerakan juga menjadi salah satu sarana bagi mereka memperoleh emansipasi. Kemudian, Jati (2014) dalam *Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa Ke Masa* lebih lanjut menganalisis mengenai peran perempuan dalam organisasi pergerakan. Pada masa sebelum kemerdekaan, perempuan banyak bergerak dalam bidang sosial melalui berbagai organisasi seperti Wanita Oetomo, Aisyiah, dan organisasi lainnya (Jati, 2014: 285). Kemudian pasca kemerdekaan, perempuan terlibat dalam gerakan yang lebih besar seperti Gerwani dan mulai tampil dalam panggung politik. Dinamika tersebut

tentu mendekonstruksi posisi perempuan sebagai *konco wingking*, sebuah konsep yang telah lama membelenggu perempuan Indonesia. Akan tetapi lebih lanjut Jati (2014:289-290) menjelaskan bahwa pasca pemerintahan Soekarno berakhir, terjadi subordinasi perempuan sehingga posisi perempuan kembali menjadi *konco wingking* dari suaminya, yang berakibat pada domestikasi peran perempuan dalam kehidupan sosial. Hal ini berdampak pada penulisan sejarah yang juga mengabaikan peran perempuan dalam sektor-sektor yang strategis, seperti sejarah diplomasi secara umum dan sejarah diplomasi kebudayaan secara khusus.

Berangkat dari pengeksklusian perempuan dalam sejarah diplomasi Indonesia, maka kajian ini hadir untuk menjelaskan peran perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai tahun 1960an. Kajian ini menitikberatkan pada dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu peran perempuan dalam diplomasi kebudayaan sejak 1945-1960an serta mengenai dinamika sosial-politik yang mempengaruhi kehadiran dan peran perempuan dalam kegiatan diplomasi kebudayaan tersebut. Aspek dinamika sosial-politik tentu perlu dihadirkan, mengingat kehadiran perempuan dalam diplomasi kebudayaan bukanlah fenomena yang berdiri secara tunggal, melainkan menjadi bagian dari agenda politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penulisan sejarah Indonesia yang lebih *androgynous*, dimana peran laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan porsi yang sama, terutama dalam kajian sejarah diplomasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Dalam proses heuristik, pengumpulan sumber dilakukan dengan studi pustaka atas kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema. Proses heuristik tersebut dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan dan

menggunakan sumber-sumber yang dapat diakses secara daring. Adapun dalam kajian ini, penulis menempatkan surat kabar seperti *The Singapore Free Press* dan *Berita Harian* sebagai sumber primer, sementara buku, artikel, dan jurnal menjadi sumber sekunder. Setelah mengumpulkan sumber, proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan isi satu sumber dengan sumber lainnya, baik primer maupun sekunder, untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipercaya. Tahap ketiga dari penelitian ini adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta sejarah yang telah didapatkan melalui proses sebelumnya. Adapun proses terakhir dari penelitian ini adalah historiografi, yaitu menuliskan fakta sejarah yang telah diinterpretasi menjadi rekonstruksi sejarah yang kronologis dan objektif.

PEMBAHASAN

Dinamika Sosial-Politik dan Pengaruhnya Pada Posisi Kaum Perempuan Dalam Diplomasi Kebudayaan Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam berbagai misi diplomasi kebudayaan Indonesia sepanjang 1945 sampai 1960an dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang terjadi sepanjang kurun waktu tersebut. Setidaknya, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi peranan perempuan dalam diplomasi kebudayaan, yaitu kebijakan politik luar negeri Indonesia serta meluasnya gerakan feminisme di Indonesia. Dua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang cukup erat dalam melibatkan perempuan pada diplomasi kebudayaan.

Secara kultural, perempuan dalam konstruksi masyarakat luas selalu dianggap sebagai *the others*-nya kaum laki-laki (Minarova-Banjac, 2018: 23). Atau dengan kata lain, perempuan dianggap sebagai *konco wingking*. Artinya, perempuan dianggap sebagai sosok yang harus tunduk dan patuh pada laki-laki. Bahkan, lebih jauh lagi, kultur masyarakat yang patriarkis telah membagi kehidupan sosial menjadi dua, yaitu ranah publik dan ranah privat. Ranah publik merupakan ruang dimana orang bisa berkarya dan melakukan

aktivitas ekonomi ataupun politik, sementara ruang privat identik dengan pekerjaan domestik seperti urusan rumah tangga. Sejak era Yunani, menurut Minarova-Banjac (2018: 23), ranah publik dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan ditempatkan ke dalam ranah privat. Begitu juga dalam hubungan internasional, dimana kepentingan memperjuangkan kedaulatan suatu negara menjadi sangat maskulin dan semua terjadi berdasarkan pembagian ranah publik dan privat tersebut (Minarova Banjac, 2018: 23). Machiavelli sebagaimana dikutip oleh Tickner (1992: 39), menggambarkan perempuan sebagai Fortuna, dewi bangsa Romawi yang konon tidak dapat diprediksi. Dewi Fortuna tersebut pada akhirnya menjadi simbol bahwa perempuan merupakan ancaman yang harus dihindari dan dihancurkan oleh laki-laki. Penafsiran yang melekatkan perempuan dengan kekacauan atau kehancuran tersebut lebih jauh berdampak pada menjauhkan perempuan dari ranah publik, termasuk politik luar negeri. Pada akhirnya, terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara peran laki-laki dan perempuan dalam hubungan internasional, lebih khusus lagi dalam upaya diplomasi. Kesenjangan tersebut berakibat pada absennya perempuan dalam sejarah diplomasi secara global, bahkan di Eropa sekalipun. Padahal, masuknya perempuan ke dalam bidang diplomasi di Eropa sebenarnya bukanlah fenomena yang baru (Aggestam dan Towns, 2018: 13).

Perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan dalam hubungan internasional sampai pecahnya Perang Dunia II. Selama masa Perang Dunia II, ketika banyak kaum laki-laki harus pergi berperang, maka kaum perempuan terutama di Barat harus melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Artinya, perempuan pada saat yang sama tengah memasuki ranah publik yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki. Fenomena ini perlahan mendekonstruksi pemikiran perempuan Barat bahwa mereka setara dan mampu mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Di sisi lain, para perempuan juga menjadi sadar bahwa anggapan ketidakmampuan perempuan selama ini muncul karena belenggu kultur patriarkis terhadap mereka. Akan tetapi, pasca Perang Dunia II, ketika kaum

laki-laki telah kembali dari medan perang, posisi kaum perempuan menjadi kembali termarginalkan. Mereka kembali kehilangan pekerjaannya yang telah digeluti selama masa-masa perang. Karenanya, ada semacam dorongan yang menyebabkan kaum perempuan berjuang untuk memperoleh kesetaraan. Pada akhirnya gerakan ini menjadi gerakan feminisme, yang terus meluas hingga ke Asia (termasuk Indonesia) ketika masa Perang Dingin. Elisabeth Armstrong dikutip oleh Lewis dan Stolte (2019: 6) menyatakan bahwa Konferensi Wanita se-Asia di Beijing pada 1949 telah menyuarakan kesetaraan gender dan menolak marginalisasi kaum perempuan. Keinginan para perempuan untuk terlibat dalam sektor-sektor publik lebih terlihat lagi pada tahun 1950an, ketika beberapa konferensi seperti *Asian Socialist Conference* tahun 1953 dan Konferensi Asia Afrika 1955 meninggalkan warisan berupa gagasan kesetaraan perempuan.

Gagasan feminisme di Indonesia juga mewujud dalam organisasi-organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial-politik, terutama selama masa pemerintahan Soekarno. Kiprah para perempuan melalui organisasi tersebut perlahan mendorong masuknya perempuan ke ranah politik nasional, salah satunya dengan diangkatnya Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Syahrir II pada 1946 (Wahyu, 2014: 28). Masuknya Maria Ulfah ke dalam kabinet menjadi momentum yang cukup penting bagi perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Pasca pengangkatan Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial, kaum perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke dalam sektor politik, termasuk di dalamnya adalah politik luar negeri. Dengan demikian, bukan tidak mungkin jika para perempuan pada akhirnya terlibat dalam misi diplomasi kebudayaan Indonesia.

Di sisi lain, masuknya perempuan ke dalam diplomasi kebudayaan juga didorong oleh politik luar negeri Indonesia yang memang membutuhkan peran mereka. Apalagi, Indonesia sebagai sebuah negara baru juga harus menunjukkan citranya pada dunia internasional. Pada masa-masa perang ketika Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya, maka perempuan yang aktif dalam bidang kebudayaan menjadi bagian dari strategi Indonesia

untuk menunjukkan eksistensinya pada dunia internasional. Sementara, Indonesia sebagai negara baru juga terus menunjukkan apresiasinya pada peran kaum perempuan. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, kaum perempuan diperbolehkan untuk terlibat dalam berbagai organisasi perempuan. Organisasi perempuan tersebut bisa bergerak di bidang politik maupun non-politik (Darwin, 2004: 287).

Memasuki tahun 1950an, Pemerintah Indonesia mengoptimalkan pengakuannya atas hak-hak kaum perempuan. Hak untuk berpolitik misalnya, ditegaskan melalui keterlibatan mereka dalam Pemilihan Umum 1955. Kemudian pada tahun 1958, Pemerintah Indonesia juga mengakui kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, melalui Undang-Undang No. 80/1958 tentang penyamarataan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan (Darwin, 2004: 287). Secara tidak langsung, pengakuan hak-hak tersebut telah mendorong kaum perempuan untuk menorehkan perannya di ranah publik, termasuk di dalamnya adalah diplomasi kebudayaan. Apalagi, diplomasi kebudayaan Indonesia banyak mengakomodasi kepentingan para penari, pembatik, atau seniman dalam bidang lainnya yang notabene merupakan “lahan” perempuan dalam berkarya.

Kemudian pada masa Demokrasi Terpimpin yang dimulai setidaknya sejak 1959, perempuan yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan Indonesia juga semakin banyak. Hal ini didukung oleh kebijakan Soekarno yang turut memegang kendali atas politik luar negeri Indonesia. Karenanya, beberapa perempuan yang merupakan publik figur atau tokoh-tokoh yang dekat dengan Soekarno dipercaya untuk terlibat dalam misi diplomasi kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, dinamika politik yang terus menerus mengupayakan pengakuan terhadap posisi kaum perempuan dalam konstruksi sosial dan politik Indonesia, disusul dengan dominasi Presiden Soekarno dalam politik luar negeri, turut mendorong masuknya kaum perempuan ke dalam berbagai misi kebudayaan.

Perempuan Dalam Diplomasi Kebudayaan Indonesia (1945-1960an)

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri dan feminisme telah mendorong masuknya perempuan ke dalam momen-momen diplomasi Indonesia, termasuk dalam diplomasi kebudayaan. Lalu, bagaimana dan seperti apa peran dan atau posisi perempuan dalam kegiatan diplomasi kebudayaan tersebut? Akan tetapi, sebelum lebih jauh membahas kehadiran perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia, maka pertanyaan yang juga penting untuk diajukan adalah sejak kapan diplomasi kebudayaan Indonesia dimulai? Dari berbagai sumber dan referensi yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya sejauh ini belum ada jawaban yang pasti mengenai kapan diplomasi kebudayaan masuk ke dalam agenda diplomasi Indonesia. Mengacu pada pendapat Cohen (2019: 256), kesenian dan kebudayaan sebenarnya telah menjadi bagian dari diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Artinya, secara praktik, diplomasi kebudayaan telah dilakukan sejak Indonesia sebagai berdiri sebagai sebuah *nation-state* (negara bangsa) dan menjalin hubungan dengan negara lain. Sementara itu, Lindsay (dalam Lindsay dan Liem, 2012) menyebutkan bahwa secara resmi, misi kebudayaan Indonesia ke negara lain baru diluncurkan pada 1954. Namun, sebelum diresmikan pada 1954, sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen (2019), Indonesia telah mengirimkan beberapa misi kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi politik Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Pada masa revolusi kemerdekaan misalnya, Indonesian Information Office yang didirikan di New York menjadi salah satu cara Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan. Melalui kantor tersebut, tokoh-tokoh Indonesia mencetak artikel dan pamflet yang berisi tentang kesenian lokal Indonesia (Cohen, 2019: 257). Pada saat itu, diplomasi kebudayaan memang digunakan sebagai pelengkap diplomasi politik, yaitu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan boneka Jepang. Keberadaan diplomasi kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi politik Indonesia tersebut pada kenyataannya tetap dipertahankan hingga akhir masa pemerintahan Soekarno pada 1960an.

Mengacu pada masalah kapan diplomasi kebudayaan Indonesia dimulai, maka perjalanan diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno dapat dibagi menjadi dua, yaitu sejak awal kemerdekaan sampai sekitar 1954, serta sejak 1954 sampai 1960an ketika Soekarno turun dari kursi kepresidenan. Sejak 1945 sampai 1954, yang menjadi fokus dari diplomasi Indonesia adalah memperjuangkan pengakuan kedaulatan hingga memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional akibat masa-masa perang. Karenanya, diplomasi kebudayaan juga mendukung upaya tersebut. Seni yang sebelumnya menjadi bagian dari aspek hiburan, bertransformasi menjadi alat bagi para diplomat dari Departemen Luar Negeri Indonesia untuk menarik dukungan dari negara lain. Kemudian mulai tahun 1954, Pemerintahan Soekarno meresmikan pengiriman delegasi misi kebudayaan resmi pertama, yang menjadikan diplomasi kebudayaan sebagai agenda resmi politik luar negeri Indonesia. Nyawa diplomasi kebudayaan tersebut semakin hidup pasca penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, yang meningkatkan citra Indonesia sebagai aktor dunia ketiga dalam kancah politik internasional. Apalagi, Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Asia, seperti Nehru hingga Zhou Enlai (Ricklefs, 2008: 516). Akibatnya, terjadi arah perubahan politik luar negeri pasca pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, dimana diplomasi tidak lagi digunakan untuk menarik dukungan dalam rangka mempertahankan kedaulatan, tetapi untuk melahirkan citra Indonesia sebagai aktor dalam politik internasional. Apalagi, warisan Konferensi Asia Afrika justru jatuh pada Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Karenanya, Soekarno memanfaatkan “keistimewaan” tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor diplomasi, meskipun dalam beberapa hal “keistimewaan” tersebut dinilai mendorong Soekarno menjadi otoriter (Acharya, 2016: 351). Terlepas dari hal itu, bagaimanapun, perubahan arah diplomasi politik Indonesia telah berdampak pada diplomasi kebudayaan yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting dari agenda politik luar negeri Indonesia. Pun pada kenyataannya, kebudayaan memang telah menjadi bagian yang lazim dari

diplomasi politik di era 1950-1960an. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Wilcox (2017:519) bahwa kebudayaan, terutama tarian, telah menjadi elemen yang umum dari diplomasi internasional 1950an sampai 1960an.

Lalu, bagaimana peran dan posisi kaum perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia? Selama lima tahun pertama kemerdekaan Indonesia, tercatat berbagai diplomasi kebudayaan telah dilakukan. Diplomasi kebudayaan paling awal barangkali dilakukan pada September 1945, ketika beberapa seniman Indonesia terlibat dalam pameran kesenian di Rijksmuseum, Amsterdam, Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya, karya seni dari seniman legendaris seperti Basoeki Abdullah juga masuk dalam kegiatan diplomasi kebudayaan Indonesia. Namun sayangnya, keberadaan perempuan sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan belum muncul dalam sumber-sumber yang berbicara tentang pameran dan kebudayaan Indonesia yang ditampilkan di negara lain. Tentu, sangat terbuka kemungkinan bahwa perempuan telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Hanya saja, pendokumentasian dan penulisan sumber yang sangat patriarkis menjadikan peran perempuan tenggelam diantara peran seniman laki-laki.

Memasuki 1950an, kaum perempuan perlahan mendapatkan tempat dalam dokumentasi dan penulisan sumber atas kegiatan diplomasi kebudayaan Indonesia. Pada dasarnya, kaum perempuan yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni figur perempuan elit dan figur perempuan biasa. Perempuan elit yang dimaksud dalam kajian ini ialah orang-orang yang memiliki prestasi tertentu dalam kesenian dan telah dikenal banyak orang, seniman yang dekat dengan istana, atau para perempuan yang memang bekerja di badan-badan kebudayaan milik negara. Sementara itu, para perempuan yang merupakan pelajar, mahasiswi, hingga kalangan rakyat biasa, tidak jarang juga terlibat dalam misi diplomasi kebudayaan tersebut.

Pada awal 1950an, Pemerintahan Soekarno melibatkan perempuan yang memiliki prestasi dalam bidang kesenian dan kebudayaan untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Perempuan tersebut antara lain

Effie Tjoa, didampingi oleh composer Mochtar Embut (Mohammed, 2017: 99). Effie Tjoa merupakan perempuan sopranis Indonesia pertama yang juga melanjutkan pendidikannya di Belanda dan Italia. Dengan masuknya Effie Tjoa dalam delegasi diplomasi kebudayaan Indonesia, maka lagu seriosa juga menjadi bagian yang penting dari misi tersebut. Bahkan, bergabungnya Effie Tjoa dengan lagu-lagu seriosa yang dibawakannya menjadi salah satu tonggak yang cukup penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia sepanjang 1950 sampai 1960an. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kehadiran perempuan penyanyi seriosa menjadi penting bagi diplomasi kebudayaan Indonesia? Agaknya, diterimanya perempuan penyanyi seriosa dalam misi diplomasi kebudayaan Indonesia tidak terlepas dari misi politik Indonesia untuk dikenal luas dalam kancah politik internasional. Pada tahun 1950an, lagu seriosa menjadi salah satu simbol dari modernitas yang dikenal oleh orang-orang Eropa. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk turut masuk ke dalam nuansa modernitas tersebut. Selain itu, lagu seriosa dianggap sebagai musik yang mampu menciptakan romantisme, diterima oleh banyak kalangan, dan dianggap mampu menjembatani pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa, terutama negara-negara sosialis (Mohammed, 2017: 172). Sementara itu, kaum perempuan menjadi aktor utama dalam misi tersebut, mengingat Presiden Soekarno menaruh kepercayaan penuh kepada kaum perempuan. Selain itu, dengan kehadiran perempuan yang berprestasi seperti Effie Tjoa, menjadikan Indonesia semakin dikenal luas oleh negara-negara Eropa.

Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia mengakomodasi baik lagu-lagu seriosa maupun kebudayaan tradisional dalam diplomasi kebudayaan. Pada 1952, Indonesia mengirimkan delegasinya dalam diplomasi kebudayaan di *Colombo Exhibition*. Dalam delegasi tersebut, turut serta para seniman Indonesia, termasuk di dalamnya adalah para perempuan. Para penari perempuan membawakan tarian tradisional dari Bali, yang memukau perhatian delegasi dari negara-negara lain (The Singapore Free Press, 25 Maret 1952: 8). Kemudian pada 1954, Pemerintah Indonesia mengirimkan

delegasi resminya yang pertama ke China untuk memperkenalkan kebudayaan lokal. Di dalam delegasi tersebut terdapat tokoh perempuan bernama Sutanti, pegawai Kantor Djawatan Kebudayaan Urusan Kesenian (Lindsay, dalam: Lindsay dan Liem, 2012: 191-192). Selain Sutanti, terdapat beberapa seniman perempuan lainnya yang berasal dari berbagai kota seperti Bandung, Solo, Makassar, Medan, Padang, dan Jakarta (Lindsay, dalam: Lindsay dan Liem, 2012: 193). Menurut Lindsay (2012), terdapat 25 perempuan dalam rombongan seniman tersebut. Meskipun jumlah perempuan masih tergolong lebih sedikit daripada jumlah laki-laki yang terlibat dalam misi kebudayaan tersebut, akan tetapi setidaknya perempuan telah mendapatkan tempat dalam misi-misi kebudayaan Indonesia ke luar negeri.

Ketika menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada 1955, pamor Indonesia dalam percaturan politik internasional semakin meningkat, khususnya dalam hal politik luar negeri (Wibisono, 2015: 3-4). Pasca Konferensi Asia Afrika, Indonesia dianggap sebagai pemimpin negara-negara kawasan Asia Afrika yang belum merdeka. Pada saat yang sama, Indonesia memang memiliki semangat untuk mengajak negara-negara yang belum merdeka agar terus melawan imperialisme. Upaya Indonesia ini pun, mendapat dukungan dari Uni Soviet dan China (Wibisono, 2015: 9-10). Dukungan tersebut pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor politik internasional. Di sisi lain, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika juga telah mengangkat kebudayaan sebagai bagian yang penting dari momen diplomasi, hal ini terlihat dari simbol-simbol kebudayaan dapat dilihat dalam konferensi tersebut (Shimazu, 2011). Mengikuti perkembangan diplomasi politik ini, maka pasca 1955, diplomasi kebudayaan mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Indonesia. Bahkan, diplomasi kebudayaan digunakan untuk mendukung penuh gerak politik Indonesia. Sementara mengenai pengiriman delegasi untuk diplomasi kebudayaan, pada dasarnya mengikuti bagaimana sikap Indonesia terhadap aliansi politik tertentu atau dilaksanakan ketika

terjadi kerapuhan dalam hubungan bilateral (Lindsay, dalam: Lindsay dan Liem, 2012: 205).

Mengacu pada hasil kajian Lindsay (dalam Lindsay dan Liem, 2012: 205), diplomasi kebudayaan Indonesia menjadi lebih sering dilaksanakan pasca 1957 dan terutama awal 1960an. Terhitung sejak 1957 hingga 1960an, tidak kurang dari sepuluh kali diplomasi kebudayaan dilakukan. Negara tujuan diplomasi kebudayaan ini pun sangat beragam. Pemerintahan Soekarno pernah mengirimkan delegasi untuk diplomasi kebudayaan ke negara yang berafiliasi dengan Blok Timur maupun Blok Barat. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan dari diplomasi kebudayaan tersebut mayoritas adalah negara-negara yang baru merdeka, negara-negara sosialis, serta negara yang menjadi sekutu Indonesia dalam gerakan antiimperialisme (Lindsay, dalam: Lindsay dan Liem, 2012: 199). Sepanjang tahun 1960 sampai 1965, beberapa negara sosialis yang menjadi tujuan diplomasi kebudayaan Indonesia antara lain Uni Soviet, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Selain itu, delegasi diplomasi kebudayaan juga dikirimkan ke Amerika Serikat.

Untuk mempererat hubungan diplomatik dengan negara tetangga di Asia Tenggara, Soekarno juga mengirimkan delegasi untuk diplomasi kebudayaan ke negara-negara ASEAN. Lagu seriosa turut menjadi andalan Indonesia dalam misi diplomasi kebudayaan ke negara-negara tetangganya. Pada Juni 1959, Indonesia mengirimkan delegasi untuk diplomasi kebudayaannya ke Singapura. Dalam misi tersebut, Effie Tjoa turut terlibat. Penampilannya mendapatkan perhatian dari Singapura dan negara-negara di sekitarnya, mengingat kemampuan Effie Tjoa yang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, perempuan lulusan Academy of St. Cecilia di Roma tersebut membawakan lagu dalam berbagai Bahasa, mulai dari Indonesia, Jerman, Prancis, Rusia, hingga Mandarin (Berita Harian, 27 Juni 1959: 6). Satu tahun berikutnya, Indonesia mengirimkan 65 orang ke Malaya untuk memperkenalkan kesenian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah lagu seriosa (Mohammed, 2017: 100). Dalam delegasi tersebut, beberapa diantaranya yang menjadi penyanyi seriosa juga adalah kaum perempuan.

Misi ini turut meningkatkan posisi Indonesia di kancah politik regional, sebab pasca pelaksanaan misi tersebut, penyanyi seriosa perempuan asal Indonesia seperti Effe Tjoa, Norma Sanger, dan penyanyi perempuan lainnya dikenal luas di Asia Tenggara.

Agaknya, Pemerintah Indonesia memang menaruh kepercayaannya secara penuh pada para perempuan untuk menjalankan diplomasi kebudayaan. Meskipun, banyak dari perempuan tersebut adalah kalangan yang dekat dengan Soekarno seperti penyanyi Istana, atau figur yang telah dikenal luas oleh publik. Misalnya dalam Berita Harian (21 Desember 1960: 7) diberitakan bahwa para perempuan Indonesia turut hadir dalam agenda diplomasi kebudayaan Indonesia ke Malaysia. Dalam delegasi yang dikirimkan, terdapat figur perempuan seperti Titi Puspa dan Tuti Daulay yang ikut serta dalam rombongan tersebut, guna membicarakan kerja sama kebudayaan dengan Yayasan Wanita Muar Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, Titi Puspa maupun Tuti Daulay merupakan dua figur perempuan yang tidak asing lagi bagi Pemerintah Indonesia.

Dalam mengirimkan misi kebudayaan ke negara-negara sosialis dan komunis, para perempuan juga turut dilibatkan. Padahal, pada saat yang sama Perang Dingin masih terjadi, dimana pertandingan kekuasaan antara Blok Barat dan Blok Timur juga menyebar luas ke Asia Tenggara. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tampaknya tidak ragu untuk melibatkan perempuan dalam misi-misi kebudayaannya. Pada September 1961, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi untuk diplomasi kebudayaan ke dua negara sekaligus, yaitu China dan Rusia (The Singapore Free Press, 16 September 1961: 7). Inche Sumarjo yang merupakan pemimpin delegasi kebudayaan tersebut menyatakan bahwa ada 28 peserta dalam delegasi yang dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia, dimana tujuh diantaranya merupakan perempuan (The Singapore Free Press, 16 September 1961: 7). Para perempuan tersebut merupakan orang-orang yang berperan sebagai penari.

Dua tahun kemudian, sejarah juga mencatat bahwa Indonesia kembali melibatkan perempuan dalam agenda diplomasi kebudayaannya. Hal ini

dibuktikan dengan adanya rombongan mahasiswi dan pelajar Indonesia yang dinaungi oleh Badan Kerjasama Kesenian Mahasiswa Indonesia untuk menampilkan kesenian lokal Indonesia di Kuala Lumpur dan Singapura (Berita Harian, 30 Agustus 1962: 5). Akan tetapi, ketika beberapa waktu kemudian Soekarno menyatakan konfrontasi terhadap Malaysia, upaya diplomasi kebudayaan ke Malaysia mengalami hambatan. Perempuan Indonesia baru dikabarkan kembali terlibat dalam diplomasi kebudayaan ke Malaysia pada 1967. Pada 1967, terdapat tokoh perempuan bernama Haryati Santoso, yang merencanakan kegiatan pameran hasil kebudayaan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia (Berita Harian, 28 Februari 1967:6). Diantara hasil kebudayaan yang dipamerkan antara lain pakaian tradisional, hiasan sanggul yang terbuat dari kulit penyu, serta beberapa perhiasan tradisional khas Bali.

Pada masa transisi dari era Soekarno menuju era pemerintahan Soeharto, perempuan juga tetap menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Pada Agustus 1967, Berita Harian menyoroiti keterlibatan para perempuan dalam misi kebudayaan ke Singapura yang diketuai oleh Sumarjo L.E. Misi kebudayaan yang diikuti oleh 73 orang dimana 23 diantaranya merupakan perempuan adalah bagian dari realisasi perjanjian kerja sama kebudayaan antara Indonesia dengan Singapura yang ditandatangani pada bulan Februari di tahun yang sama (Berita Harian, 18 Agustus 1967: 6). Dalam misi kebudayaan tersebut terdapat seorang pelajar perempuan bernama Christien, berusia 15 tahun, yang mendapat perhatian dari sejumlah media di Singapura. Menurut berita yang dimuat dalam Berita Harian (18 Agustus 1967: 6), Christien merupakan pelajar perempuan asal Solo yang sekaligus menjadi penyanyi dan penari piring. Pada dasarnya, misi kebudayaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya memandang bahwa diplomasi kebudayaan dapat mengakomodasi peran perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar. Dengan kata lain, peran perempuan pada saat itu menjadi sangat penting dalam diplomasi kebudayaan Indonesia.

Pada Oktober 1967, misi kebudayaan kembali diadakan di Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat mengadakan pameran batik di Singapura. Dalam acara tersebut, terdapat lima puluh jenis batik khas Indonesia yang dipamerkan (Berita Harian, 29 Oktober 1967: 10). Dalam misi kebudayaan tersebut, perempuan mendapatkan peran yang cukup penting. Selain terlibat dalam proses penyiapan kain batik hingga pelaksanaan pameran, Pemerintah Indonesia juga mengundang beberapa model perempuan untuk memeragakan penggunaan batik. Menurut Berita Harian (29 Oktober 1967:10), terdapat Rima Melati dan tiga tokoh perempuan lainnya yang menjadi model peragaan busana batik khas Indonesia.

Pada bulan Desember 1967, Indonesia juga menyelenggarakan pameran batik di Malaysia sebagai bagian dari normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Nyonya Bintang Sudibyو atau Ibu Sud, perempuan yang terlibat dalam misi kebudayaan tersebut, mengatakan bahwa pameran batik pada Desember 1967 tersebut merupakan pameran batik pertama yang diselenggarakan pasca perdamaian Indonesia-Malaysia (Berita Harian, 17 Desember 1967: 3). Tati Purnomo, anak dari Nyonya Bintang Sudibyو, dalam pameran tersebut juga memperkenalkan batik yang dapat digunakan untuk membuat pakaian khas negara lain. Dalam Berita Harian (19 Desember 1967: 6) disebutkan bahwa Tati Purnomo mendesain pakaian tradisional negara lain dengan kain batik. Noni Taib, salah satu perempuan yang menjadi model dalam pameran tersebut, memperagakan kain batik yang oleh Tati Purnomo diubah menjadi pakaian khas Filipina dan Thailand. Sementara itu, Tati Purnomo mengenakan batik yang telah dirancang menjadi pakaian khas Malaysia oleh Nyonya Bintang Sudibyو (Berita Harian, 19 Desember 1967: 6). Sebenarnya, pameran batik tersebut bukanlah misi kebudayaan pertama yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, Indonesia telah menyelenggarakan pameran hasil kesenian berupa lukisan di Balai Ampang, Kuala Lumpur. Pameran tersebut merupakan

pameran lukisan pertama sejak pecah konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam pameran tersebut, turut serta dua pelukis wanita asal Indonesia, yaitu Roeliati Soewarjono dan Ida Hadjar. Sebanyak 222 buah lukisan dipamerkan dalam kegiatan tersebut (Berita Harian, 1 Agustus 1967: 6). Akan tetapi, lukisan yang menarik perhatian banyak orang adalah karya dari dua pelukis yang telah disebutkan sebelumnya, Roeliati Soewarjono dan Ida Hadjar, dimana keduanya menggunakan teknik melukis yang masih sangat tradisional dan tidak terpengaruh budaya populer (Berita Harian, 1 Agustus 1967: 6). Tentu, kedua pelukis perempuan tersebut menjadi tokoh yang penting untuk mengakrabkan kembali hubungan Indonesia-Malaysia melalui acara pameran yang tengah berlangsung.

Pada dasarnya, kaum perempuan telah menjadi ujung tombak dalam misi diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan juga memiliki peran dan posisi yang penting dalam menghadirkan eksistensi Indonesia dalam peta politik internasional, meskipun sejauh ini peran mereka masih tertutupi oleh kebesaran peran laki-laki. Namun pasca berakhirnya pemerintahan Soekarno, posisi perempuan dalam misi diplomasi Indonesia mengalami subordinasi. Terutama pada masa pemerintahan Soeharto, perempuan kembali dimasukkan ke dalam ruang-ruang domestik. Meskipun dalam kesempatan tertentu, perempuan tetap mendapat tempat dalam diplomasi kebudayaan. Hal ini dikarenakan Soeharto menjadikan diplomasi kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, untuk mencari bantuan ke luar negeri (Wuryandari, *ed.*, 2008: 118). Sebagaimana menurut Wie (2005: xlv), bahwa Soeharto "... mewarisi kebangkrutan ekonomi yang berada di tepi jurang kehancuran". Akan tetapi, peran perempuan tidak se-massif pada era Soekarno. Bahkan, hal ini justru berlangsung hingga awal masa reformasi dimana perempuan masih memiliki posisi tawar yang lemah pada bidang politik (Darwin, 2004: 293).

PENUTUP

Secara umum, masuknya perempuan ke dalam ranah diplomasi kebudayaan dipengaruhi oleh kondisi sosial politik selama kurun waktu 1945-1960an. Selama kurun waktu tersebut, gerakan feminisme yang meluas menjadi faktor penentu pasang surut peran perempuan dalam diplomasi kebudayaan. Gagasan kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme telah mendekonstruksi posisi perempuan sebagai *konco wingking* dan bekerja di ranah privat. Feminisme pada akhirnya telah mendorong masuknya perempuan ke ranah public seperti diplomasi yang sebelumnya dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Akan tetapi, masuknya perempuan dalam diplomasi kebudayaan juga tidak lepas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang memang membutuhkan peran perempuan. Bagaimanapun, harus diakui bahwa perempuan menjadi perantara yang handal dalam normalisasi hubungan bilateral atau untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah internasional.

Sejak menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa revolusi, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Memang, perempuan dalam diplomasi kebudayaan berbeda dengan para diplomat yang memperjuangkan Indonesia di perundingan. Perempuan dalam diplomasi kebudayaan lebih sering berperan sebagai penari, pelukis, atau memperkenalkan kebudayaan lain dari Indonesia kepada masyarakat negara lain. Akan tetapi, dalam konteks politik luar negeri Indonesia, keberadaan dan peran para perempuan tersebut menjadi sangat sentral. Hal ini disebabkan oleh posisi diplomasi kebudayaan yang seringkali menjadi misi alternatif bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingannya, menarik dukungan dari negara lain, atau untuk meningkatkan citra baiknya di dunia internasional.

Pada dasarnya, kaum perempuan yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan Indonesia era Soekarno didominasi oleh perempuan elit. Perempuan elit yang dimaksud dalam kajian ini adalah publik figur seperti seniman yang telah memiliki prestasi atau dekat dengan Istana seperti Effie Tjoa, Nyonya Bintang Sudibyso atau Ibu Sud, Rima Melati, Titi Puspa, dan tokoh perempuan lainnya. Dengan demikian, publik figur perempuan pada

dasarnya turut memberikan kontribusinya dalam sejarah perjalanan diplomasi Indonesia. Meskipun di sisi lain, Presiden Soekarno juga melibatkan pelajar perempuan dan atau rakyat biasa dalam diplomasi kebudayaan, akan tetapi tokoh-tokoh publik lebih sering mendapat tempat dalam media atau sumber-sumber sezaman.

Akan tetapi, dari berbagai misi diplomasi kebudayaan Indonesia, tampaknya jarang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin delegasi. Melalui berbagai misi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa hampir setiap misi kebudayaan dipimpin oleh laki-laki, baik dari kalangan Pemerintah maupun dari kalangan seniman. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa Soekarno baru sampai pada tataran aktor atau pelaksana diplomasi. Dengan kata lain, para perempuan tersebut merupakan agen-agen kebudayaan Indonesia, bukan sebagai pengambil kebijakan dalam rangka diplomasi kebudayaan. Terlepas dari hal itu, kajian di atas menunjukkan bahwa bukan hanya kaum laki-laki yang memiliki peran dalam diplomasi di era Soekarno. Bagaimanapun, kaum perempuan juga telah menorehkan sumbangannya dalam membentuk citra Indonesia sebagai sebuah negara baru dan berdaulat dalam peta politik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- “Balinese Art Is Mystifying, But It Grips”. 25 Maret 1952. *The Singapore Free Press*. Hlm. 8. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 1 Agustus 2020 pukul 19.55 WIB.
- “Batek Indonesia Jadi Pakaian Kebangsaan Wanita-Wanita Segala Bangsa”. 19 Desember 1967. *Berita Harian*. Hlm. 6. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 3 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB.
- “Effie Penyanyi Yang Ta’ Asing Dengan Ra’ayat”. 27 Juni 1959. *Berita Harian*. Hlm. 6. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 3 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB.
- “Gadis Pelajar Dari Solo Ikut Dalam Rombongan Budaya Indonesia Ka-S’pura”. 18 Agustus 1967. *Berita Harian*. Hlm 6. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 23 Juli 2020 pukul 23.11 WIB.
- “Jakarta Dance Team May Perform Here”. 16 September 1961. *Berita Harian*. Hlm. 7. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 23 Juli 2020 pukul 22.15 WIB.
- “Lawatan Ahli-Ahli Budaya R.I”. 21 Desember 1960. *Berita Harian*. Hlm. 7. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 22 Juli 2020 pukul 09.45 WIB.
- “Pameran Bahan-Bahan Batek di Gudang Robinson”. 29 Oktober 1967. *Berita Harian*. Hlm 10. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 1 Agustus 2020 pukul 13.45 WIB.
- “Pameran Batek Indonesia”. 17 Desember 1967. *Berita Harian*. Hlm. 3. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 1 Agustus 2020 pukul 08.25 WIB.
- “Pameran Seni Indonesia: Dua Pelukis Wanita Turut Serta”. 1 Agustus 1967. *Berita Harian*. Hlm. 6. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 5 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.
- “Rombongan Budaya Indonesia”. 30 Agustus 1962. *Berita Harian*. Hlm. 5. Diakses melalui <https://eresources.nlb.gov.sg/>, pada 22 Juli 2020 pukul 10.28 WIB.
- Acharya, Amitav. 2016. “Studying the Bandung Conference from A Global IR Perspective”. *Australian Journal of International Affairs*. Vol. 70. No. 4. Hlm. 342-357.

- Aggestam, Karin, dan Ann Towns. 2018. "The Gender Turn in Diplomacy: A New Research Agenda". *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 21. No. 1. Hlm. 9-28.
- Agung, Ida Anak Agung Gde. 1990. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Cohen, Matthew Isaac. 2019. "Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Vol. 175.No. 2-3. Hlm. 253-283.
- Darwin, Muhadjir. 2004. "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. No. 3. Hlm. 283-294.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2014. "Historisitas Politik Perempuan Indonesia". Dalam *Paramita*. Vol. 24. No. 2. Hlm. 200-210.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Lewis, Su Lin, dan Carolien Stolte. 2019. "Other Bandungs: Afro-Asian Internationalisms in the Early Cold War". *Journal of World History*. Vol. 30. No. 1-2. Hlm. 1-19.
- Lindsay, Jennifer. 2012. "Performing Indonesia Abroad". Dalam Jennifer Lindsay, dan Maya H. T. Liem (ed.). *Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965*. Leiden: KITLV Press.
- Minarova-Banjac, Cindy. 2018. "Gender Culture in Diplomacy: A Feminist Perspective". *Culture Mandala*. Vol. 13. No. 1. Hlm. 20-44.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 1996. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa Buku II*. 4 Jilid. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Sharifah Faizah Syed Mohammed. 2017. "The History and Development of Lagu Seriosa in the Context of Musical Nationalism in Indonesia". *Disertasi*. School of Arts and Social Sciences, Monash University Malaysia.

- Shimazu, Naoko. 2011. "Diplomacy as Theatre: Recasting the Bandung Conference of 1955 as Cultural History". *Asia Research Institute Working Paper*. No. 164. Hlm. 3-19.
- Tickner, J. Anne. 1992. *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. New York: Colombia University Press.
- Vreede-de Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wahyu, Itama Citra Dewi Kurnia. 2014. "Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wibisono, H.K. 2015. "Indonesia's Foreign Politics 1955-1965: Between Decolonisation and Beacon Politics". *International Journal of Indonesian Studies*. Vol. 1. Hlm 1-14.
- Wie, Thee Kian (ed.). 2005. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950an-1990an*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Wilcox, Emily. 2017. "Performing Bandung: China's Dance Diplomacy with India, Indonesia, and Burma, 1953-1962". *Inter-Asia Cultural Studies*. Vol. 18. No. 4. Hlm. 518-539.
- Wuryandari, Ganewati (ed). 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI.